

ABSTRAK

Pembangunan Berkelanjutan menekankan pada keseimbangan, kesetaraan dan keadilan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pendidikan Berkualitas merupakan tujuan nomor 4 pembangunan berkelanjutan yang dianggap sebagai fondasi dari 16 poin pembangunan berkelanjutan lainnya melalui penciptaan individu yang berkualitas dan kompeten. Selain itu, peran penting pendidikan dalam meningkatkan mendorong pembangunan wilayah termasuk pertumbuhan ekonomi menjadikannya sebagai salah satu aspek penting dalam perkembangan wilayah. Keadilan spasial yang merujuk pada pemerataan akses layanan publik berdasarkan distribusi geografis merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyediaan layanan pendidikan terutama dalam distribusi fasilitas pendidikan. Ketimpangan spasial antarwilayah yang dihasilkan dari ketidaksetaraan distribusi terhadap fasilitas sosial termasuk fasilitas pendidikan, menjadi tantangan utama dalam perwujudan pembangunan yang berkelanjutan, adil dan setara.

Kabupaten Semarang merupakan daerah penyangga Kota Metropolitan Semarang, menyebabkannya menerima dampak berupa peningkatan jumlah penduduk. Kabupaten Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 26.862 jiwa selama lima tahun terakhir dengan laju pertumbuhan pada tahun 2020-2023 adalah sebesar 0,86%. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat, mengharuskan Kabupaten Semarang menyediakan layanan fasilitas umum dengan daya tampung yang mencukupi untuk menghadapi kebutuhan yang juga terus meningkat. Urgensi peningkatan daya tampung fasilitas pendidikan di Kabupaten Semarang terlihat dari ketimpangan antara ketersediaan dengan kebutuhan layanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Semarang. Pada tahun 2023, daya tampung fasilitas pendidikan SMP tidak sebanding dengan banyaknya siswa lulusan SD. Namun, disisi lain, ratusan SD negeri di Kabupaten Semarang mengalami kekurangan siswa, terutama pada kawasan perkotaan. Selain itu, angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Semarang juga belum menyentuh angka 100%, terutama pada jenjang SMA/SMK sederajat yang memiliki angka partisipasi murni (APM) hanya sebesar 66% yang menandakan bahwa belum seluruh penduduk usia sekolah di Kabupaten Semarang menempuh jenjang pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data kuantitatif seperti data jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah daya tampung fasilitas pendidikan pada setiap jenjangnya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan jenjang dasar dan menengah secara parsial (setiap jenjang) dan korespondensial (antarjenjang), serta tingkat ketimpangan layanan fasilitas pendidikan antarkecamatan di Kabupaten Semarang. Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa rata-rata nilai pelayanan SD di Kabupaten Semarang adalah 72%; SMP sebesar 85%; dan SMA/SMK sebesar 82%. Sedangkan berdasarkan hasil analisis korespondensial, jenjang SD-SMP memiliki nilai pelayanan sebesar 103%; dan SMP-SMA/SMK sebesar 97%. Berdasarkan hasil perhitungan agrgeat tingkat pelayanan di Kabupaten Semarang diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata nilai pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Semarang tergolong tinggi dengan nilai sebesar 19 poin. Sedangkan berdasarkan perbandingan tingkat pelayanan antarkawasan di Kabupaten Semarang diketahui bahwa kawasan dengan klasifikasi PKL dan perkotaan cenderung memiliki tingkat pelayanan yang lebih baik dibandingkan kawasan dengan klasifikasi non-PKL dan perdesaan di Kabupaten Semarang. Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan pada kawasan PKL adalah sebesar 21 poin; non-PKL sebesar 18 poin; perkotaan sebesar 19 poin; dan perdesaan 17 poin. Berdasarkan perhitungan tingkat ketimpangan nilai pelayanan fasilitas pendidikan antarkecamatan di Kabupaten Semarang dengan menggunakan Indeks Williamson, diketahui bahwa ketimpangan parsial terbesar adalah pada jenjang SMA/SMK yaitu sebesar 0,57 yang tergolong ketimpangan berat, sedangkan pada jenjang SD sebesar 0,18 dan jenjang SMP sebesar 0,32 tergolong ketimpangan ringan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan spasial dalam penyediaan layanan pendidikan di Kabupaten Semarang masih belum terwujud dikarenakan masih terdapat ketimpangan inter kecamatan dan intra kecamatan. Oleh karena itu, penulis merumuskan rekomendasi kebijakan berupa penambahan jumlah fasilitas pendidikan dan peningkatan daya tampung fasilitas pendidikan eksisting. Kecamatan yang menjadi prioritas pengembangan fasilitas SD adalah Kecamatan Ungaran Timur, Pabelan dan Susukan; fasilitas SMP adalah Kecamatan Ungaran Timur, Jambu dan Bawen; fasilitas SMA/SMK adalah Kecamatan Ungaran Timur, Sumowono dan Getasan.

Kata Kunci: *Pembangunan Berkelanjutan, Pendidikan, Tingkat Pelayanan, Keadilan Spasial, Ketimpangan*